

BAB I

PENDAHULUAN

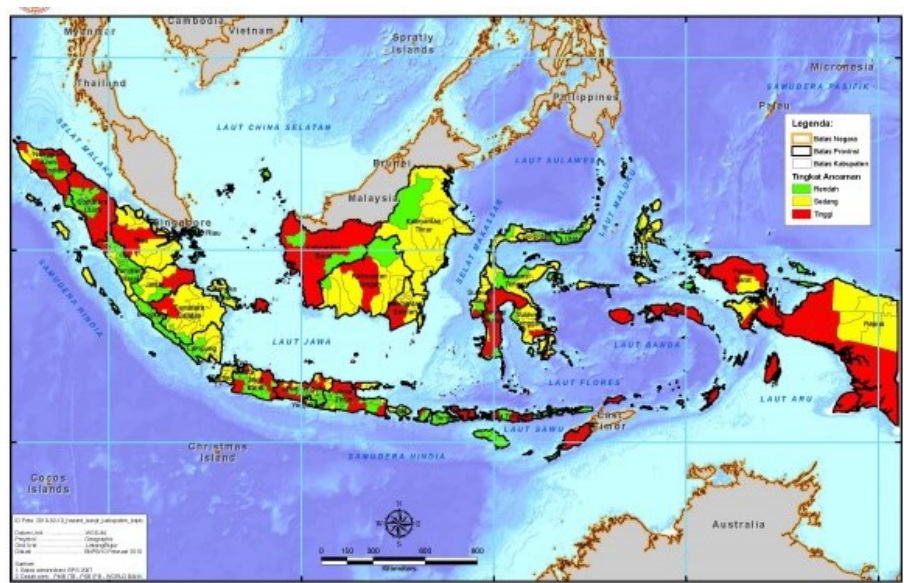
1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan dua musim peralihan, diantaranya musim penghujan dengan musim kemarau. Terjadinya pergeseran musim di wilayah Indonesia ialah ditandai dengan faktor terjadinya peristiwa tidak menentunya suhu yakni fenomena yang terjadi karena adanya perbedaan yang tidak normal. Fenomena tersebut menyebabkan meningkatnya suhu dataran air laut yang tidak stabil ditambah dengan curah hujan (Rahayu et al.,2018). Masyarakat mendapatkan dampak buruk bencana alam dari adanya perubahan iklim yang cukup tinggi, karena tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, disertai kurangnya akses jalan pintas yang menghambat interaksi para warga sekitar.

Menurut Safitri et al., (2020) Bencana alam sendiri ialah fenomena alam yang tidak bisa diprediksi maupun dihindari, bencana alam rentan menimbulkan kerugian pada masyarakat baik kerugian dalam materi maupun kerugian dalam non materi (Fahrurrozi & Ishardhi, 2021). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana memberikan makna yaitu sebuah fenomena yang berpotensi mengganggu serta mengancam kehidupan maupun aktivitas masyarakat yang disebabkan karena faktor lingkungan dan faktor non lingkungan sampai menyebabkan terjadinya kerusakan alam, dampak psikolog, kerugian dan kerusakan harta benda.

Bencana alam memberikan dampak negatif yang menjadikan perekonomian warga sekitar menurun karena lahan pertanian terdampak banjir serta rumah para

warga juga mengalami kerusakan yang dari kerusakan sedang sampai kerusakan parah. Pada tahun 2015-2019 Indonesia dikategorikan negara yang memiliki potensi bencana alam yang memiliki peringkat 35 secara global (Nurjanah & Apriliani, 2021).

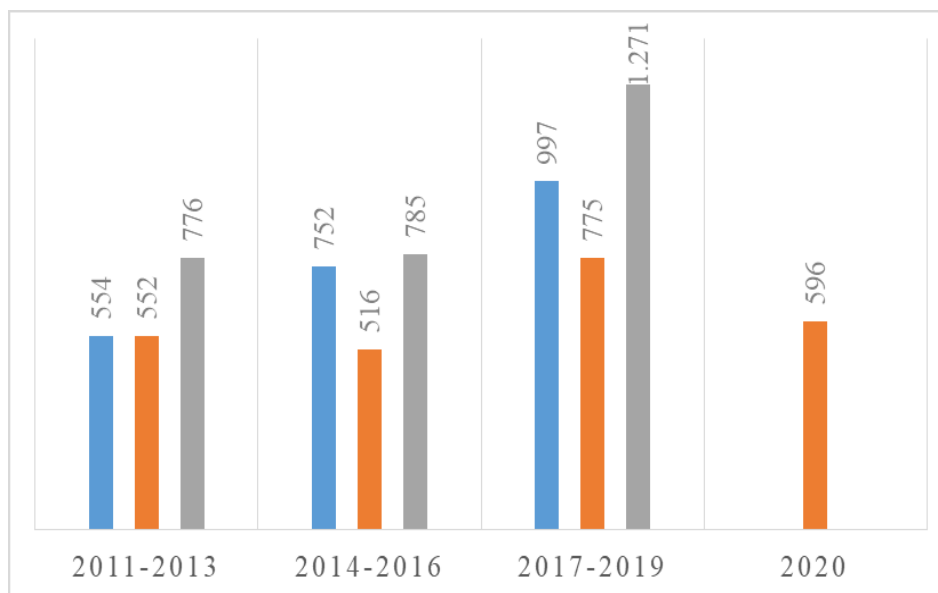


Gambar 1.1 Peta Indeks Risiko Bencana di Indonesia

Sumber : BNPB (2020)

Pada grafik 1.1, dapat dilihat bahwa menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan banjir terparah di Indonesia dalam satu dekade terakhir melaporkan 7.574 banjir, dari tahun 2011 sampai pada 22 September 2020. Bencana tersebut bisa dibidang tidak menetap atau fluktuatif. Selama 10 tahun terakhir terdeteksi bahwa bencana tersebut mencapai tingkatan yang cukup tinggi. Pada tahun 2019 adalah bencana banjir yang sering terjadi yakni sebanyak 1.271 kali, di tahun 2017 yakni 997 kali dan tahun 2013 yakni sebanyak 776 kali, di tahun 2016 naik yakni mencapai 785 kali, serta jumlah bencana tersebut

pernah mengalami penurunan yakni di tahun 2015 sebanyak 516 kali, (Annur, 2020).



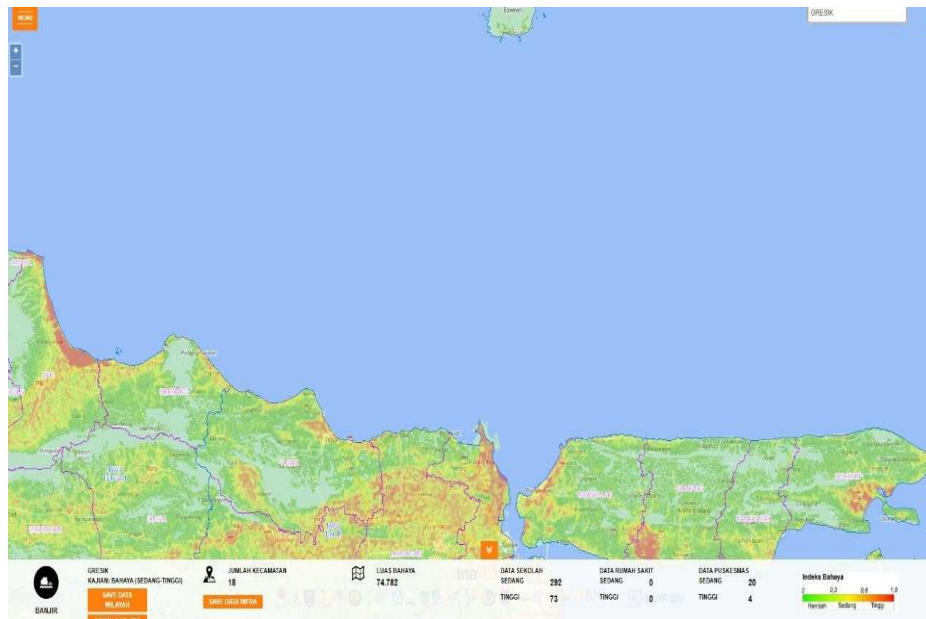
Grafik 1.1 Angka Banjir Periode 10 Tahun Terakhir Di Indonesia

Sumber : katadata.co.id 22 September 2020

Dalam fenomena terjadinya bencana banjir tersebut dapat dianalisa berdasarkan kelembapan udara yang diklasifikasikan sebagai kelembaban, sehingga laporan dari citra satelit menunjukkan normalitas pembentukan awan konvensional atau pergerakan awan yang secara vertikal dalam atmosfer, maka dari itu besar kemungkinan menyebabkan terjadinya hujan berintensitas standar sampai dengan berintensitas tinggi yang menjadikan fenomena banjir (Urbanus et al., 2021). Serta dari daerah yang memiliki jalur kanan kiri sungai dan berada pada daerah yang memiliki dataran relatif rendah sangat rentan menimbulkan bencana alam. Dalam keadaan ketinggian air hujan berlebihan serta memiliki permukaan dataran lebih rendah dibandingkan dengan tingginya permukaan air laut maka akan menjadi salah satu penyebab alami yang menjadikan sebuah fenomena bencana

banjir, dan menjadikan dampak ke masyarakat dengan dibebani rasa takut akibat jumlah kerusakan dan kerugian yang timbul akibat dari bencana tersebut (Saputra et al., 2020). Bencana banjir dapat disebabkan karena perbuatan manusia dikarenakan kurangnya menjaga lingkungan dengan kebiasaan membuang sampah ke sungai sampai ke samping jalanan, hal ini mengakibatkan bencana banjir dengan sebab aliran sungai tersumbat, selanjutnya penyebab bencana banjir ialah karena ketinggian air hujan dalam waktu yang lama karena akan berakibat debit air sungai meningkat serta sistem *drainase* atau saluran air tidak bisa menyerap intensitas turunnya air hujan, maka dari itu akan berakibat banjir di suatu daerah (Sari et al., 2020).

Daerah Jawa Timur terutama pada Kabupaten Gresik adalah daerah rawan bencana banjir, bahkan sudah menjadi bencana umum yang melanda Kabupaten Gresik akibat luapan sungai lamong (Sari et al., 2020). Kali lamong sendiri terletak di Provinsi Jawa Timur yang merupakan bagian dari wilayah Sungai Bengawan Solo yang dikelola oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo (Wardono et al., 2021). Besarnya daerah aliran sungai (DAS) kali lamong lebih dari 720 km² dengan panjang alur sungai lebih dari 103 km. Wilayah DAS kali lamong berada pada bagian hulu Kabupaten Lamongan dan Mojokerto, serta bagian hilir adalah pada perbatasan Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya, dimana aliran sungai bermuara pada Selat Madura (Wardono et al., 2021). Penyerapan air hujan dalam intensitas tinggi tidak bisa stabil dan berakibat bencana pada daerah dekat sungai. (Sari et al., 2020).



Gambar 1.2 Peta Potensi Bahaya Bencana Banjir Kabupaten Gresik

Sumber :BNPB 2021

Rosmi et. al (2020) menjelaskan bahwa secara geografis Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik ialah daerah yang merupakan salah satu paling dekat dengan wilayah Kali Lamong, apabila terjadi curah hujan yang tinggi maka daerah di Kecamatan Benjeng mengalami dampak secara cepat. Debit sungai Kali lamong cenderung sangat besar sehingga berakibat aliran debit tidak mengalir dengan baik, air sungai meluap dan menggenangi beberapa daerah sekitar sungai, seperti pemukiman warga, lahan pertanian, dan akses jalan (Wardono et al., 2021). Utomo (2020) juga menyatakan bahwa banjir di tahun 2020 melanda sejumlah wilayah di Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. Banjir tersebut karena dampak dari luapan kali lamong. Dampak dari luapan kali lamong tersebut membuat para warga merasa cemas dan mengalami kerugian yang tak terduga. Seperti diungkapkan oleh Kapolsek Benjeng AKP Soleh Lukman Hadi yang dimuat dalam media *online* news.detik.com, beliau mengatakan:

“...Air yang mulai mengalir pagi ini disebabkan oleh tingginya curah hujan di wilayah hulu. Akibat luapan sungai lamong, air menggenangi pemukiman di empat desa, dan di desa lain membanjiri persawahan, menurut kabar terbaru, ketinggian air sekitar 10-40 cm...”
 Sumber: <https://news.detik.com/>. Akses tanggal 05 November 2021 pukul 20.45 WIB.

Berita di atas didukung oleh Sriyono & Widji (2020) menyatakan bahwa warga Kecamatan Benjeng sedang dilanda kecemasan, yaitu kali ini banjir lebih besar dibanding banjir sebelumnya, terjadinya curah hujan semakin deras sehingga kali lamong tidak bisa menampung air terlalu besar, dan pada akhirnya meluapnya ke pemukiman warga sekitar. Saat hujan deras di wilayah Mojokerto wilayah Lamongan dan wilayah Gresik akan kumpul menjadi satu di kali lamong, maka mayoritas desa yang menjadi langganan banjir adalah di kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. Seperti yang diungkapkan oleh warga setempat dalam media *online* klikku.net, beliau mengatakan :

“...Saat hujan deras di wilayah kecamatan Benjeng pasti akan terjadi banjir besar. Warga setempat alami kecemasan karena tidak bisa aktivitas normal, harus nunggu air surut karena akses jalan tidak bisa dilewati dengan kendaraan bermotor. Yang mana tempat tinggal tergenangi banjir dengan ketinggian air 70 cm sampai 100 cm sampai 150 cm, pemukiman area ladang wilayah Kecamatan Benjeng juga tergenang banjir, sehingga para petani mengalami kerugian besar...”
 Sumber : <https://klikku.net/>. Akses tanggal 08 November 2021, pukul 09.21 WIB.

Mayoritas masyarakat Benjeng yang tinggal di dekat sungai kali lamong merupakan masyarakat yang bekerja sebagai tani, ataupun mencari ikan, maka dari itu tingkat pendidikan serta tingkat perekonomiannya bisa dibilang rendah, pernyataan tersebut bersumber dari rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gresik pada tahun 2016-2021. Dalam hal ini para masyarakat memiliki keterbatasan kemampuan untuk menyikapi atau

menanggapi maupun mengatasi bencana alam serta terkait pemahaman masyarakat dalam bencana dan cara mengurangi risiko cukup rendah (Amalia & Sari, 2018).

Pada desa-desa yang setiap tahunnya terdampak bencana banjir di haruskan memiliki kelengkapan dalam fasilitas tersebut yang dibutuhkan untuk percepatan penanganan bencana terutama di Desa Lundo karena seringnya terdampak bencana banjir. Namun warga Lundo juga masih berasumsi bahwa bencana ini semua tanggung jawab seluruhnya kepada petugas bencana, dalam berita media *online* Redaksi, (2021) Kepala Desa Lundo menjelaskan :

“...Dua kali bencana banjir melanda Desa Lundo di akhir tahun 2020, masyarakat terdampak banjir luapan kali lamong belum tersentuh sama sekali bantuan maupun penanganan tanggap bencana dari BPBD, instansi seperti BPBD terlihat tidak responsif dan kepedulian terhadap adanya bencana banjir akibat luapan kali lamong yang melanda Desa Lundo. Saya tidak habis pikir...”.

Sumber : <https://suara-publik.com/>. Akses tanggal 09 November 2021 pukul 09.54 WIB.

Dari fenomena di atas tersebut tidak menunjukkan kondisi ideal. Padahal pada dasarnya tim penolong/ tim *Search And Rescue* (SAR) bukan satu-satunya yang paling menjadi penolong dalam keadaan darurat atau musibah, namun juga dibutuhkan peran serta masyarakat yang ikut antusias didalamnya (Rosmi et al., 2020). Masyarakat juga diharuskan memiliki pengetahuan terkait kejadian alam yang menimbulkan bencana dan memiliki pemahaman tentang mitigasi bencana. Dalam menghadapi suatu bencana tersebut diharuskan memiliki implikasi langsung terhadap masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Karena sangat penting untuk memiliki partisipasi publik serta untuk meringankan pengurangan dalam pengurangan risiko bencana maka kesadaran masyarakat harus ditingkatkan (Safitri et al., 2020).

Tabel 1.1 Angka Bencana Banjir dan Penduduk di Kecamatan Benjeng Tahun 2020

No.	Desa/ Kelurahan	Jumlah Bencana Banjir (kali)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	Lundo	9	2.574
2.	Sedapurklagen	9	1.514
3.	Deliksumber	6	2.434
4.	Kedungrukem	6	2.706
5.	Gluranploso	6	1.786
6.	Kalipadang	6	3.120
7.	Munggugianti	3	1.931
8.	Sirnoboyo	2	5.331
9.	Karangankidul	2	2.792
10.	Munggugebang	1	2.666
11.	Kedungsekar	1	3.548
12.	Balongtunjung	0	1.056
13.	Balongmojo	0	1.685
14.	Bulangkulon	0	2.380
15.	Bengkelolor	0	1.246
16.	Bulurejo	0	3.770
17.	Dermo	0	1.580
18.	Klampok	0	3.096
19.	Banter	0	2.432
20.	Metatu	0	5.001
21.	Jogodalu	0	4.115
22.	Punduttrate	0	3.019
23.	Jatirembe	0	3.063

Sumber : Badan Pusat Statistik 2021

Dari data BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2021 Kabupaten Gresik menyebutkan bahwa angka bencana banjir menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Benjeng di tahun 2020 tertinggi adalah di Desa/Kelurahan Lundo dan Desa Sedapurklagen. Banjir tersebut sangat mengganggu para warga terutama para warga di Desa Lundo yang memiliki kepadatan penduduk lebih tinggi dibanding Desa sedapurklagen, karena tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Pada

Desa Lundo salah satu desa yang selalu sering terdampak banjir di bandingkan desa lainnya, maka dari itu Desa Lundo sangat sering mengalami kerugian materi maupun non-materi, serta dalam kondisi tersebut kesehatan juga ikut terganggu. Dalam hal tersebut nasib masyarakat Desa Lundo sangat prihatin, yang hidup berdampingan dengan bencana serta aktivitas lainnya sangat terganggu dan sangat tidak nyaman, serta sampai tidak bisa beraktivitas keluar rumah seperti halnya bekerja, pergi ke sekolah dan lainnya.

Tabel 1.2 Keberadaan Fasilitas Mitigasi Bencana Alam Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Benjeng 2020

No.	Desa/ Kelurahan	Sistem Peringatan Dini Bencana Alam	Perlengkapan Keselamatan
1.	Lundo	-	-
2.	Sedapurklagen	-	-
3.	Deliksumber	-	-
4.	Kedungrukem	-	-
5.	Gluranploso	-	-
6.	Kalipadang	-	-
7.	Munggugianti	Ada	Ada
8.	Sirnoboyo	-	-
9.	Karangankidul	Ada	-
10.	Munggugebang	-	-
11.	Kedungsekar	-	-
12.	Balontunjung	-	-
13.	Balongmojo	-	-
14.	Bulangkulon	Ada	-
15.	Bengkelolor	-	-
16.	Bulurejo	Ada	Ada
17.	Dermo	-	-
18.	Klampok	-	-
19.	Banter	-	-
20.	Metatu	-	-
21.	Jogodalu	-	-
22.	Punduttrate	-	-
23.	Jatirembe	-	-

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab.Gresik 2021.

Dari data di atas menunjukkan bahwa Desa Lundo dari segi fasilitas guna menunjang keselamatan para masyarakat masih kurang dan tidak adanya peringatan dini pada bencana alam, serta dalam mitigasi di daerah Desa Lundo juga sangat rendah, penanganan bencana melalui rambu-rambu dan jalur evakuasi di setiap desa hanya ada satu disalah satu desa tersebut. Untuk normalisasi maupun pembuatan serta perawatan sungai juga belum sepenuhnya dibilang baik. Dari uraian tersebut seharusnya dalam upaya antisipasi maupun perlengkapan keselamatan dan peringatan dini sudah tersedia guna keselamatan diri secara cepat serta mempermudah para masyarakat dalam melakukan penyelamatan diri dan untuk mengantisipasi kejadian bencana alam yang timbul selanjutnya di kemudian hari, serta dengan berlindung ke tempat yang lebih aman.

Dari uraian diatas, dapat dilakukan proses mitigasi bencana guna meminimalisir kerentanan risiko yang berlebihan. Pada mitigasi bencana memiliki tujuan untuk mengurangi dampak yang timbul terutama bagi warga sekitar, dan sebagai acuan guna perencanaan pembangunan serta meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menghadapi dampak maupun risiko bencana (Arif, 2020). Bencana alam dikategorikan masalah global yang upaya mitigasinya dapat di adopsi di negara lain yang ada di dunia yang diantaranya dengan metode mitigasi berbasis struktur maupun non-struktur dan juga metode mitigasi berbasis masyarakat. Dari tulisan Khaira et al., (2020) menyebutkan bahwa untuk mitigasi bencana telah terjadinya tindakan serta perubahan paradigma yang dari *top-down* ke *bottom-up*. Pada media *online* SuaraJatim.Id bahwa BPBD Kabupaten Gresik

siaga banjir, merespon naiknya debit air kali lamong di wilayah setempat yang menyatakan bahwa :

“...kami para petugas terus memantau ketinggian air kali lamong, saat ini debit air kali sudah meningkat tetapi di beberapa titik masih aman, kami telah melakukan mitigasi daerah rawan bencana bahkan sejumlah perahu darurat juga sudah disiagakan dan beberapa di desa-desa...”

Sumber : [Debit Air Kali Lamong Mulai Naik, BPBD Gresik Siaga Banjir | Suara.com](#). Akses tanggal 27 Mei 2022, pukul 16.15 WIB.

BPBD Kabupaten Gresik melakukan upaya tersebut, karena hujan dengan intensitas tinggi di wilayah hulu kali lamong naik begitu signifikan, akibatnya membuat jalan lingkungan Desa Lundo tergenang air setinggi lutut orang dewasa dan menggenangi area persawahan. BPBD Kabupaten Gresik terus melakukan koordinasi guna pendataan dan monitoring lebih lanjut (Ramadan, 2021). Selain itu, kunjungan oleh Ibu Aminatun Habibah selaku wakil bupati Gresik berkunjung ke Desa Lundo untuk meninjau kali lamong guna perkembangan penanganan banjir serta pembenahan infrastruktur jalan poros desa, hal ini dilansir pada media *online* [tribun jatim.com](#), beliau menyatakan bahwa :

“... untuk normalisasi dan pembangunan infrastruktur adalah bagian dari prioritas bagi kami, mengingat desa ini adalah salah satu sektor pertanian, maka dari itu, jika jalannya dan infrastruktur sudah mendukung, saya yakin perekonomian akan naik, masyarakatnya sejahtera dan maju...”

Sumber : [Ngantor di Desa Lundo Benjeng, Wabup Gresik Tinjau Anak Kali Lamong - Tribunjatim.com \(tribunnews.com\)](#). Akses tanggal 13 Juni 2022, pukul 15.00 WIB.

Ibu Aminatun Habibah selaku wakil bupati gresik tersebut melakukan mitigasi dalam bentuk pembangunan, dengan harapan untuk mensejahterakan para warga desa tersebut. Dari adanya upaya ini, wakil bupati berharap dukungan dan antusias dari masyarakat tersebut agar bisa berjalan dengan baik sesuai tujuan tersebut (Abraham, 2022),

Masyarakat dilibatkan sebagai objek utama saat terjadinya bencana alam dan diharuskan memiliki kemampuan dalam mengatasi kerentanan yang ada, masyarakat dijadikan objek utama dalam upaya mitigasi bencana karena dapat meminimalkan kerugian. Hal tersebut akan terwujud jika masyarakat memiliki perencanaan dan pengetahuan mitigasi bencana serta pemahaman terkait apa yang seharusnya dilakukan sebelum bencana, saat terjadi bencana, dan setelah terjadi bencana. Pentingnya dalam meningkatkan kesadaran ini agar masyarakat bisa meminimalisir kerugian yang terjadi (Safitri et al., 2020). Karena mitigasi bencana bukan hanya masalah yang ditanggung pada pemerintah namun juga kewajiban dan tanggungjawab bersama antar semua pihak (Nurjanah & Apriliani, 2021).

Dalam peraturan perundang-undangan terkait mitigasi bencana saat ini ialah diharuskan untuk melibatkan para warga sekitar yang terdampak bencana guna meminimalisir risiko bencana di sekitarnya. Khaira et al., (2020) juga menyatakan bahwa partisipasi para masyarakat sangat dibutuhkan karena masyarakat bukan hanya sekedar menjadi korban/objek dari penanggulangan bencana, namun juga sebagai pelaku dari penanggulangan bencana. Dari sini dinyatakan bahwa mitigasi bencana berbasis masyarakat atau *community based disaster mitigation* adalah metode yang tepat guna penanganan bencana saat ini. Menurut BNPB juga mengatakan bahwa terkait tindakan guna mitigasi bencana bahwa para masyarakat juga diharuskan terlibat dan tidak hanya pemerintah yang didorong, melainkan atas kesadaran individu, keluarga, maupun komunitas yang mencakup seluruh ruang lingkup masyarakat dalam menghadapi bencana secara langsung. Maka dari itu

konsep mitigasi berbasis masyarakat atau *Community Based Mitigation* adalah metode yang tepat dalam langkah mitigasi bencana (Yunia et al., 2020).

Untuk penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi mitigasi bencana maka *Non-Government Organization* (NGO) memiliki kontribusi yang sangat penting salah satunya komunitas karang taruna guna memberikan sosialisasi maupun edukasi kepada masyarakat, berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2011 terkait pedoman Relawan Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa kontribusi relawan atau NGO dalam mitigasi bencana adalah menyelenggarakan pelatihan bersama masyarakat dan penyuluhan bersama masyarakat. Serta menyediakan informasi mitigasi bencana dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat (Yanti & Alhadi, 2019). Hal ini sangat diperlukan guna meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap meningkatnya jumlah ancaman bencana tersebut (Aprilyanto et al., 2021). Karena masyarakat juga harus memiliki kontribusi, karena kontribusi dari masyarakat sangat penting dalam mitigasi bencana, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 16 ayat (3) menjelaskan bahwa kegiatan kesiapsiagaan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan dilaksanakan bersama-sama masyarakat, dan juga lembaga usaha guna mitigasi bencana secara menyeluruh (*comprehensif*). Serta pada dasarnya masyarakat dijadikan salah satu unsur yang terpenting di dalamnya (Anggun et al., 2020).

Berkaitan dengan mitigasi berbasis masyarakat dalam pengurangan risiko bencana banjir, menurut teori dari Maskrey, (1989) terdapat kajian penerapan *Non-Government Organization* untuk mitigasi berbasis masyarakat yang mengkaji

beberapa dimensi yaitu diantaranya *Strengthening Community Based Organization* (penguatan organisasi berbasis masyarakat), *Identifying Needs and Priorities* (mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas), *Developing Proposals* (mengembangkan proposal), *Encouraging Participation* (mendorong partisipasi), *Integrating Mitigation with Development* (mengintegrasikan mitigasi dengan pembangunan), pada teori tersebut peneliti gunakan sebagai acuan dengan alasan berdasarkan substansi relevan serta menjelaskan secara keseluruhan dalam fenomena dan permasalahan yang telah dikaji yang sesuai dengan penelitian yang ada di lapangan.

Adanya penelitian terdahulu yang menjadi bahan rujukan penulis yaitu milik Amalia & Sari, (2018) yang berjudul Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Membangun Partisipasi Masyarakat Tanggap Bencana Banjir Di Kabupaten Gresik digunakan penulis sebagai pembanding untuk melihat dari sisi pemerintah dalam membangun partisipasi masyarakat tanggap bencana banjir, hal ini menunjukkan hasil bahwa strategi BPBD dalam membangun partisipasi masyarakat tanggap banjir adanya kendala yaitu kurangnya antusias warga karena faktor usia dan pekerjaan. Selanjutnya penelitian terdahulu milik Fahrurrozi & Ishardhi, (2021) yang berjudul *Community-Based Disaster Mitigation System In Muncar Beach, Banyuwangi Regency* menunjukkan bahwa dalam penelitian tersebut terdapat hasil yang menjelaskan paradigma terhadap penanganan bencana di tingkat penduduk belum cukup banyak berubah dan masih dibidang mitos. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang mitigasi tersebut masih sangat rendah.

Pada penelitian terdahulu yang selanjutnya milik Khaira et al., (2020) yang berjudul Program penanggulangan bencana berbasis masyarakat dalam kesiapsiagaan masyarakat menghadapi banjir sungai Krueng, Langsa Nanggroe Aceh Darussalam-Indonesia. Terdapat hasil bahwa adanya pengaruh berdasarkan uji *Wilcoxon*, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa adanya perubahan dari program penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang mampu meningkatkan indeks kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi banjir. Selanjutnya penelitian terdahulu milik Yunia et al., (2020) yang berjudul Program Berbasis Masyarakat dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Pandeglang. Terdapat hasil yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam program ini menjadi kunci utama sebagai inisiator, perencanaan hingga pada pelaksanaan kegiatan.

Dari kondisi di atas menunjukkan bahwa masih lemahnya dalam pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian ini untuk menyadarkan serta memberikan pengetahuan bahwa adanya perubahan paradigma dari mitigasi bencana yang dari *top down approach* ke *bottom up approach*, karena kontribusi masyarakat sangat diperlukan, terutama para pemuda/pemudi NGO/LSM dalam penguatan guna ketahanan keselamatan jiwa. Adanya novelty dari penulisan ini adalah penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis menggambarkan bahwa teori dari Maskrey, (1989) yang penulis gunakan tidak pernah digunakan oleh peneliti sebelumnya. Teori ini sangat cocok digunakan dalam penulisan ini karena sangat menjelaskan lebih dalam tentang mitigasi berbasis masyarakat dan memberikan kesadaran serta pemahaman kepada masyarakat bahwa penanggulangan bencana adalah juga melibatkan seluruh

masyarakat. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk membedah dan melakukan penelitian terhadap fenomena tersebut dan dengan menuliskan penelitian yang berjudul **“Mitigasi Berbasis Masyarakat Dalam Pengurangan Risiko Bencana Banjir Di Desa Lundo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji lebih dalam oleh penulis pada penelitian ini adalah “Bagaimana Mitigasi Berbasis Masyarakat (*Community Based Mitigation*) Dalam Pengurangan Risiko Bencana Banjir Dilakukan Desa Lundo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik?”

1.3 Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah “ Untuk mengetahui, menganalisis dan mengeksplorasi/ memperoleh pengetahuan lebih banyak tentang mitigasi berbasis masyarakat (*community based Mitigation*) dalam pengurangan risiko bencana banjir dilakukan Desa Lundo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik”.

1.4 Manfaat Penulisan

- a) Bagi penulis guna persyaratan mendapatkan gelar sarjana pada program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan menambah wawasan yang mendalam terkait mitigasi berbasis masyarakat dalam pengurangan risiko bencana banjir di Desa Lundo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.

- b) Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur untuk memberikan sumbangsih literatur bacaan serta memberikan tambahan referensi di perpustakaan dan guna sebagai kajian pada penelitian selanjutnya pada universitas maupun pada fakultas.
- c) Bagi Pemerintah/instansi/ Dinas Organisasi/ Pihak Lainnya Yang terlibat Sebagai bahan evaluasi serta kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai mitigasi berbasis masyarakat dalam pengurangan risiko bencana banjir di Desa Lundo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.